



• IST  
BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Anggota DPR RI Komisi X, I Wayan Koster dan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata saat menghadiri karya atma wedana lan manusa yadnya di Wantilan Desa Adat Kapal, Rabu (9/11) kemarin.

MANGUPURA, NusaBali  
Untuk pertama kalinya, Desa Adat Kapal, Mengwi melaksanakan karya atma wedana lan manusa yadnya (metatah dan mepetik) secara massal, pada Buda Pon Medangkungan, Rabu (9/11) kemarin di Wantilan Desa Adat Kapal. Puncak karya tersebut dihadiri oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Anggota DPR RI Komisi X, I Wayan Koster, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Anggota DPRD Badung asal Kapal I Nyoman Ardana, Camat Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra, dari Dinas Kebudayaan, Majelis Madya dan Majelis Alit, Lurah Kapal serta tokoh masyarakat Kapal.

Manggala Karya I Ketut Sudarsana didampingi Plt. Ke-lilian Desa Adat Kapal I Ketut Sudira menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama Ketua DPRD Badung serta Bapak I Wayan Koster pada upacara atma wedana dan manusa yadnya di Desa Adat Kapal. Karya ini merupakan upacara yang pertama/perdana digelar desa adat Kapal. Diharapkan upacara ini dapat berlanjut setiap 3 (tiga) tahun sekali. "Upacara ini dapat dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan dari bupati Badung, semoga kedepan upacara ini tetap dapat dilaksanakan tiga tahun sekali," jelasnya. Upacara ini terlaksana atas bantuan penuh dari dana hibah kabupaten Badung tahun

Edisi : Kamis, 10 Nov 2016

Hal : 2

## Radar Bali



2016 sebesar Rp 450 juta.

Ditambahkan, yang mengikuti upacara atma wedana/memukur sebanyak 108 sekah/puspa, metatah 291 orang dan mepetik sebanyak 151 orang, sanan mpeg 47 orang. Rangkaian karya sudah dimuali sejak, Minggu (30/10) lalu dengan nunas ica, pada Senin (7/11) dilaksanakan upacara ngajum sekah, Selasa (8/11) memben upakara, ngrauhng sanghyang pitara dan pakala hyang. Pada Rabu (9/11) Puncak Karya. Besoknya (10/11) upacara nganyut dan meajar-ajar di Danu Beratan dan pada Jumat (11/11) upacara megat sot.

Bupati Badung I Nyoman

Giri Prasta menyampaikan, pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung pelaksanaan upacara atma wedana dan manusa yadnya yang dilaksanakan krama desa adat Kapal ini. Menurutnya, Pemkab Badung saat ini telah membuat program kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Badung. Upacara seperti ini menjadi salah satu yang menjadi skala prioritas dalam upaya pelestarian seni, adat, agama dan budaya. Selain itu Bupati menegaskan mulai tahun 2017 nanti, untuk bidang pendidikan dan kesehatan di Badung akan digratiskan.

“Biaya pendidikan dan kesehatan di Badung gratis. Kami pastikan tidak ada lagi pungutan di pendidikan dan di kesehatan bagi masyarakat Badung yang berobat akan ditanggung penuh oleh pemerintah,” tambahnya.

Sementara anggota DPR RI Dr. Ir. I Wayan Koster, MM juga sangat mendukung pelaksanaan upacara atma wedana dan manusa yadnya di Desa Adat Kapal, terlebih upacara ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Badung. Kedepan diharapkan hal ini harus terus didukung penuh oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan pelestarian seni, adat, dan budaya di Bali. @

Edisi : Kamis, 10 Nov 2011

Hal : 2



## KORUPSI UPAH PUNGUT

### Eksepsi Ditolak, Sukar Seret Bupati Bangli

DENPASAR – Pupus sudah harapan Bagus Rai Dharmayudha, terdakwa korupsi Upah Pungut (UP) pajak sektor pertambangan Kabupaten Bangli, untuk bisa lolos dari tuntutan hukum. Ini menyusul keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang menolak eksepsi yang diajukan terdakwa. Dalam putusan sela majelis hakim yang diketuai Sutrisno, menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangli sudah cermat dan benar.

Selain menolak eksepsi Bagus, majelis hakim juga tidak mengabulkan eksepsi terdakwa AA Gede Alit Darmawan (berkas terpisah). Dalam amar putusannya, hakim menilai keberatan yang diajukan kedua terdakwa yang disidang terpisah ini sudah masuk pokok perkara. Sehingga harus di buktikan dalam persidangan. “Menolak eksepsi dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi,” tegas Sutrisno, kemarin (9/11).

Harapan dua terdakwa untuk bisa menghadirkan Bupati Bangli aktif saat ini, Made Gianyar juga bakal sulit terwujud. Pasalnya, hakim tidak menanggapi isi eksepsi terdakwa Dharmayudha dan Darmawan yang meminta majelis hakim menyeret Bupati Bangli, Made Gianyar dan mantan Bupati Arnawa serta jajarannya yang telah menikmati uang UP sejak 2006 hingga 2010. Sidang akan dilanjutkan Rabu (16/11) pekan depan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

JPU Erlan Jaelani mendakwa terdakwa Bagus dan Darmawan dengan Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dan subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, berdasar perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali, menyebabkan kerugian negara Rp 533 juta untuk terdakwa Bagus, dan Rp 392 juta untuk terdakwa Dharmawan. (san/rid)

Edisi : Kamis, 10 Nov 2016

Hal : 33



## Kasek di Badung Terancam Pecat

Kalau Tarik Pungutan ke Siswa Baru

**MANGUPURA**- Sudah jadi rahasia umum pungutan terhadap siswa baru yang ingin melanjutkan sekolah. Nah, untuk itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kembali mengeluarkan ancaman, bakal memecat kepala sekolah (kasek) yang melakukan pungutan kepada siswa baru. Ini karena bupati menginginkan sekolah yang dikelola Pemkab Badung murni gratis alias siswa tidak dipungut biaya.

Bupati Giri Prasta menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar SD Negeri dialokasikan anggaran sebesar Rp 56,7 miliar lebih. Sedangkan untuk SMP Negeri sebesar Rp 17,02 miliar lebih.

Bupati juga mengungkapkan, *aci-aci* atau kegiatan upacara di sekolah juga akan ditanggung APBD. "Tahun 2017 jangan sampai ada pungutan ❀

► Baca *Kasek...* Hal 31

## Anggaran Laptop Rp 80 Miliar

■ KASEK

Sambungan dari hal 21

Kalau terbukti, saat itu juga saya pecat kepala sekolahnya. Saya ingin sekolah gratis memang murni gratis," jelas Giri Prasta pada pembukaan sidang paripurna DPRD Badung, Selasa kemarin (9/11),

Lebih lanjut, pemerintah menanggung semua kebutuhan sekolah. Pengadaan seragam yang selama ini dijadikan alasan pungutan, akan ditanggung

pemerintah melalui APBD. Untuk seragam anak kelas I SD Negeri dan kelas VII pada SMP Negeri sebanyak 16.406 orang dialokasikan anggaran sebesar Rp 25,5 miliar lebih. "Yang kami tanggung mulai sepatu, kaus kaki, seragam, topi, ikat pinggang, rompi, dasi, baju Pramuka, termasuk diberikan ongkos jahit," terangnya.

Sementara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) juga diinstruksikan seluruh kepala sekolah mem-

buat fakta integritas. Kemudian, anggaran pendapatan dan belanja sekolahnya juga harus dicek. Untuk tahun 2017 mendatang, pengadaan laptop untuk anak SD dilanjutkan.

Kali ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 80,9 miliar lebih untuk pengadaan laptop sebanyak 8.668 unit. Sebelumnya pada anggaran perubahan 2016 telah diadakan sebanyak 8.636 unit laptop untuk anak kelas VI SD Negeri dengan anggaran Rp 80,6 miliar lebih. (dwi/pit)

Edisi : Kamis, 10 Nov 2016

Hal : 21 dan 31